

Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019

Indonesian Journal of Religion and Society,
2021, Vol. 03 (01), 33-48
© The Journal, 2021
DOI: 10.36256/ijrs.v3i1.150

www.journal.iainigo.org/index.php/LJRS

LJRS Journal

Article History

Received: May 11th, 2021

Revised: June 26th, 2021

Accepted: June 29th, 2021

Riki Ronaldo

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia
ronaldoricky769@gmail.com

Darmaiza

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia
darmaiza@uinib.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan politisasi simbol agama di media online dalam menentukan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Studi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan melalui studi terhadap dokumen pemberitaan media online. Studi ini menemukan bahwa ada dua simbol agama yang secara masif dipergunakan dalam penetapan Capres dan Cawapres Pemilu 2019, yakni identitas kemusliman dan identitas keulamaan. Capres dan Cawapres Pemilu 2019 yang berkontestasi adalah hasil dari tarik-menarik simbol-simbol agama yang digunakan pada tahap awal Pemilu Presiden 2019. Pada tahap ini identitas Muslim menjadi tawaran yang ditransaksikan dalam penetapan pasangan Capres dan Cawapres. Begitu pula dengan ulama dan sejumlah Ormas keagamaan. Serangkaian seremonial keagamaan seperti *ijtihad* dan *ijtimak* turut dijadikan sebagai media pelegitimasi untuk memunculkan kontestan Pemilu Presiden 2019. Menariknya, hasil *ijtihad* dan *ijtimak* tidak bersifat statis dan baku, namun ia bersifat dinamis yang dapat berubah menyesuaikan dengan situasi politik yang terjadi. Hal ini kemudian telah menyebabkan menguatnya politik kebencian.

Kata Kunci: Politisasi Agama, Politik Identitas, Simbol Agama.

ABSTRACT

*This study aims to describe the politicization of religious symbols in online media in the decide of presidential and vice presidential candidates in Indonesian election 2019. This study is a descriptive qualitative research with data collection through study document to online media news. This study found that there are two religious symbols that are massively used in determining the presidential and vice presidential candidates for the 2019 election, namely Muslim identity and religious identity. The contested 2019 presidential and vice presidential candidates are the result of the tug-of-war between religious symbols used in the early stages of the 2019 presidential election. At this stage, Muslim identity becomes an offer that is transacted in the determination of the presidential and vice presidential candidates. Likewise with ulama and a number of religious organizations. A series of religious ceremonies such as *ijtihad* and *ijtima* is also used as a legitimating medium to raise contestants for the 2019 Presidential Election. Interestingly, the results of *ijtihad* and *ijtima* are not static and standard, but dynamic and can change according to the political situation that occurs. This in turn has led to the strengthening of hate politics.*

Keywords: Politicization of Religion, Identity Politics, Religious Symbols

Corresponding Author

Name : Riki Ronaldo

Email : ronaldoricky769@gmail.com

1. Pendahuluan

Studi menjelaskan tentang politisasi simbol agama di media online dalam melahirkan Capres dan Cawapres pada kontestasi politik 2019 yang menyebabkan menguatnya politik kebencian. Praktik politisasi agama di media online ini tidak saja melahirkan politik identitas, lebih dari itu ia juga telah menyebabkan terjadinya penguatan politik kebencian atas nama agama. Politisasi agama terlihat kentara pada momen-momen politik seperti pemilu; Pileg, Pilkada, dan Pilpres. Hal ini (politisasi agama) terlihat sekali di Pilpres 2019 bagaimana agama itu dijadikan alat atau senjata untuk kepentingan kemenangan kekuasaan. Seperti pada tahap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang banyak memanfaatkan tokoh-tokoh agama atau ulama, hingga pada tahap kampanye yang banyak menggunakan simbol-simbol agama seperti penggunaan peci/kopiah, kain sarung, jubah putih, sorban, hingga tasbeih, kemudian pemanfaatan terhadap ritual agama seperti shalat, dzikir, silaturahmi, pengajian. Tak luput pula pemanfaatan terhadap lembaga atau ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, FPI, PA 212, FUI, HT yang kemudian menimbulkan polarisasi terhadap umat beragama (Partai Allah vs Partai Setan, NU vs FPI, HT, dan Muhammadiyah, Ulama Sana vs Ulama Sini), hingga konflik di dunia nyata (Faridah & Mathias, 2018). Nurani (2018) dalam penelitiannya juga menemukan fakta bahwa apapun yang disuguhkan oleh media terutama isu tentang agama sangat cepat menyentuh emosional umat beragama, sehingga hal ini menimbulkan reaksi dari umat beragama untuk berpartisipasi membela agamanya. Jauh sebelum itu, Emile Durkheim mengatakan bahwa emosional keagamaan yang sama memang bisa menjadi perekat sosial. Pada wilayah ini para penganut agama akan melakukan kerjasama yang baik dan memiliki semangat atau spirit yang tinggi dalam sosial, budaya maupun politik.

Masih dalam penelitian yang sama, Faridah juga mengatakan bahwa saat ini media sudah seperti agama baru bagi masyarakat, masyarakat telah dibuat mabuk oleh media, segala bentuk persoalan langsung dapat di baca di media, juga yang sedang dalam persoalan langsung dapat mengungkapkannya di media. Dan media ini pun mampu membentuk karakter masyarakat serta mengarahkan kepada suatu hal yang pro maupun kontra terhadap suatu persoalan tertentu. Menurut Kurniawan (2018) politisasi agama yang marak terjadi pada pilpres 2019 berawal dari keberhasilan pihak-pihak tertentu memainkan isu-isu agama dalam menggagalkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Penggunaan agama yang berlebihan dalam politik memang dapat menyebabkan terpecah-belahnya umat beragama (Faridah & Mathias, 2018). Dalam hal ini peran media tidak dapat dilupakan, media pada era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini memiliki peranan penting dalam menggiring opini publik dan dalam menentukan kesuksesan suatu tujuan politik yang ditetapkan (Anggoro, 2014). Maka tak heran disaat politisasi agama marak di praktikkan di media online hal ini dengan cepat dapat mengaduk-aduk emosi umat beragama.

Diskursus dan penelitian tentang politisasi agama sebenarnya sudah banyak dilakukan para akademisi. Berikut ini adalah beberapa pembahasannya penelitian tersebut. Pertama, studi yang fokus membahas tentang sejarah dan perkembangan politisasi agama di Indonesia (Al-Qurtuby, 2018; Mawardhi, 2012; Muzakki, 2014). Kedua, studi yang fokus membahas agama dan media seperti (Ayani, 2015; Firdaus, 2013; Ispandriano, 2013; Masduki, 2004; Muttaqin, 2012; Nurahman, 2017; Nurani, 2018; Syahputra, 2016; Zamzamy, 2016). Dan ketiga, studi yang membahas bentuk-bentuk praktik politisasi agama (Fernandes, 2019; Hafidz et al., 2017; Hasfi, 2017; Herdiansah, 2017; Malik & Batubara, 2014; Masykuri, 2019; Muthoin, 2015; Muzakki, 2014; Nawawi & Anriani, 2011; Syahputra, 2016). Kemudian keempat, studi yang fokus membahas tentang akibat ataupun dampak dari politisasi agama seperti studi yang dilakukan oleh (Faridah & Mathias, 2018; Kurniawan, 2018). Serta kelima, beberapa studi yang membahas tentang solusi atau penanganan terhadap politisasi agama (Achmad, 2018; Ruslan, 2014; Sumardiana, 2016).

Dari sekian banyak kajian tentang politisasi agama seperti telah disebutkan di atas, belum ada satupun studi yang menguraikan secara khusus tentang politisasi simbol agama di media online dalam melahirkan Capres dan Cawapres pada kontestasi politik 2019 yang kemudian menyebabkan menguatnya politik kebencian. Maka studi ini ingin memperkaya diskursus tentang politisasi agama dengan melakukan kajian secara mendalam untuk menjelaskan bagaimana politisasi simbol agama di media online dalam melahirkan Capres dan Cawapres pada kontestasi politik 2019 yang kemudian menyebabkan menguatnya politik kebencian.

Studi ini didasarkan pada argumen bahwa agama adalah instrument yang sangat berpengaruh dalam membentuk suatu tindakan masyarakat. Agama adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat beragama. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Maka disaat nilai-nilai agama seseorang di hina atau di dimainkan itu bisa menimbulkan reaksi atau tindakan dari setiap penganut agama tersebut.

Uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa penelitian ini penting dilakukan mengingat; pertama, mengetahui adanya keterlibatan agama pada kontestasi Pilpres 2019 menjadi dasar dalam penyusunan bentuk-bentuk politisasi agama yang menyebabkan politik kebencian atas nama agama. Kedua, dengan mengetahui bentuk-bentuk politisasi agama yang menyebabkan menguatnya politik kebencian atas nama agama akan memudahkan penemuan cara pengendaliannya dan meminimalisirkan potensi perpecahan umat beragama nantinya.

2. Politisasi Agama dan Politik Identitas

Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukkan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik (Malik & Batubara, 2014). Ali Maschan Moesa, dalam bukunya berjudul *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, mengatakan, politisasi agama berarti menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk emosi keagamaan, menjalin kekuatan di parlemen, dan seterusnya, tetapi tujuannya untuk kepentingan politik, bukan kepentingan agama.

Kata politisasi apabila dikaitkan dengan kata agama maka pengertian kata politisasi agama menjadi suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman, dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat keagamaan lagi. Defenisi ini secara praktis, oleh aktor atau pihak yang berkepentingan akan menjadikan agama sebagai objek yang dipahami, digagas, dan diidekan, demi sesuatu yang berhubungan dengan politik (Ramadhan & Masykuri, 2018). Agama merupakan *interplay* dominan, kalau bukan satu-satunya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Hal tersebut semakin terasa ketika melihat berbagai media yang menayangkan iklan dari sosok yang dipromosikan oleh partai politik. Tak ketinggalan para Calon Wakil Rakyat maupun Calon Kepala Daerah yang mencoba meraih simpati dengan cara “tebar pesona” yang ujung-ujungnya tidak lain adalah agar dipilih oleh masyarakat. Pada awal-awal reformasi melanda Indonesia, Amien Rais pernah mengatakan “jika ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol keagamaan digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, agama akan menjadi sebuah isu yang memecah belah kaum muslimin, dan prinsip-prinsip serta keyakinan-keyakinan yang sensitif yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan akan membebani politik pemilu”. Pendapat Amien Rais tentu sangat beralasan, sebab jika dikaitkan dengan masa kini, penggunaan simbol-simbol keagamaan; sebut saja seperti kopiah/peci, jilbab, sorban, dan lain-lain termasuk juga dari penganut agama lain (Hindu, Budha, Nasrani) yang juga menggunakan simbol-simbol sesuai dengan agama mereka masing-masing, maka akan sangat rentan sekali dengan perpecahan baik intern maupun antar umat beragama itu sendiri.

Untuk memperjelas batasan kajian tentang politik identitas diperlukan pengelaborasi teori dari sejumlah pakar. Mengingat politik identitas merupakan fokus perhatian yang relatif baru dalam perkembangan politik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam pemilu presiden di Indonesia. Upaya-upaya elite politik untuk menengahkan isu-isu primordialisme mencakup identitas etnik dan agama sebagai alat memobilisasi dukungan politik marak terjadi di Pilpres 2019. Sebagai instrumen elite politik dalam pemenangan kontestasi politik, pemanfaatan politik identitas justru

kerap menimbulkan pembelahan tajam di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu berbasis visi-misi kandidat, politik identitas terus diproduksi di ruang publik oleh elit agar memperoleh dukungan elektoral.

Terdapat beragam sudut pandang yang melihat fenomena politik identitas. Pierre Van Den Bergh (1991) maupun Ubed Abdilah (2002) (dalam Sari, 2016) menjelaskan tiga perspektif teoritis dalam mengkaji politik identitas yaitu: primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Pendekatan pertama, argumentasi primordialisme yang melihat fenomena agama dalam kategori sosio-biologis. Pandangan ini berpandangan bahwa kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang *'given'* dan tidak bisa dibantah. Secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Secara definitif, para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif dan kemampuan identitas kolektif untuk mendefinisikan dan mengartikulasi pandangan umum masa lalu dan saat ini, sekaligus juga membentuk visi untuk masa depan. Pendekatan primordial mengemukakan bahwa kepentingan individual anggota agama dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis agama sebagai sumber kekuatan sosial. Namun, pendapat ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis karena membatasi ruang tafsir dan penerangan akan perubahan dari fenomena sosial yang terjadi secara waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh Max Weber yang menjelaskan etnisitas sebagai kumpulan orang yang menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan koloni dan migrasi.

Pendekatan kedua adalah konstruktivis yang dikembangkan oleh Frederik Barth. Teori ini memandang identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun, oleh manfaat mitologi yang berlangsung melalui bahasa maupun pengalaman masa lampau. Frederik Barth (1988) (dalam Sari, 2016) lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok etnik sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok yang ada. Frederik Barth menyebut fenomena negosiasi identitas ini sebagai situasional. Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial. Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri dan harga diri baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi. Meskipun pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya, namun menurut Barth identitas ke-etnikan dan agama seseorang selalu menjadi hal utama untuk membangun kategori pembeda. Di antara sekian banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik dan agama akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam diri seseorang. Konsep identitas situasional menjelaskan bahwa setiap individu akan melakukan proses komunikasi, melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, dan setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai.

Demikian pula budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri. Barth (1988:10) dalam (Sari, 2016) kemudian menjelaskan dua pandangan soal ini: Pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik dan agama tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan. Pandangan Barth ini melihat bahwa perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dan agama dalam perjalanan hidup seseorang. Semuanya dijadikan relasi penting untuk mempertahankan kekuasaan etnik.

Kedua, dapat ditemukan hubungan sosial yang kuat, bertahan lama, dan penting di antara dua kelompok etnik dan agama yang berbeda. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya status etnik dan agama yang berbeda tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial. Tetapi menurut Barth, status sosial etnik dan agama terbentuk oleh sistem sosial tertentu. Setiap etnik dan agama dapat berkembang dan bertahan serta

mempunyai nilai-nilai budaya dan moral sehingga menjadi ciri khas identitas itu sendiri dalam berinteraksi. Demikian halnya setiap identitas ditandai dengan sistem komunikasi dan pola interaksi. Ciri kelompok etnik dan agama tersebut dapat diterima dan dapat dibedakan dengan kelompok lain yang berlangsung secara sosial dalam interaksi mereka.

Pendekatan konstruktivisme Barth, meyakini pembentukan batas-batas dan ciri khas tersebut ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Adanya perbedaan etnik dan agama dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses mempertahankan status etnik dan agama di dalam masyarakat multicultural. Dalam konteks hubungan tersebut, Frederik Barth meyakini bahwa kelompok minoritas menjadi subordinat kelompok mayoritas yang mendominasi sosialitas hubungan ini. Pada kondisi ini, yang minoritas inilah yang menjadi etnik dan agama, menjadi unik, atau bahkan terasing dan aneh.

3. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library re-search*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah bahan pustaka yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan atau merekonstruksikan fenomena-fenomena sosial tertentu secara objektif dan akurat. Dalam konteks penelitian ini, bahan-bahan kepustakaan yang dibutuhkan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini akan memanfaatkan berbagai bentuk dokumen yang berkaitan dengan politisasi agama pada pilpres 2019 di media online. Adapun media online yang digunakan adalah: pertama, YouTube: Media ini penulis pilih karena Youtube merupakan media berbasis Web yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi video yang mereka miliki, kebanyakan konten di Youtube diunggah oleh individu dan bisa dalam jumlah yang tak terbatas. Sehingga data yang berkaitan dengan politisasi agama pada Pilpres 2019 mudah ditemukan di Channel Youtube. Media online kedua yang digunakan dalam tulisan ini adalah: media siber (Portal Berita online). Media ini digunakan karena memiliki karakter khusus sehingga dalam pengolahannya media ini di atur sedemikian rupa melalui Peraturan Dewan Pers, ada kode etik dalam penulisan dan pempublikasiannya serta secara pelaksanaannya lebih profesional. Berita-berita yang telah di publikasikan biasanya tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, sehingga media ini menjadi pilihan tepat bagi penulis untuk menelusuri data-data terkait politisasi agama yang terjadi pada Pilpres tahun 2019 silam.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Secara teknis data yang telah terkumpul perlu dianalisis untuk disajikan menjadi suatu hasil penelitian. Analisis data yang merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Keterlibatan Agama Pada Tahap Pendaftaran Kontestasi Pilpres 2019

Politisasi agama yang paling banyak terjadi pada tahap ini adalah politisasi terhadap bahasa, symbol dan narasi agama, seperti beredarnya berita-berita di media online maupun di media sosial yang menampilkan sisi ke-Islam-an para kandidat seperti foto yang menggunakan peci, penggunaan bahasa-bahasa agama dalam berkampanye seperti pengucapan “*Allahhu akbar*”, sampai menampilkan keadaan saat kampanye melakukan shalat berjamaah untuk menunjukkan ketaatan kandidat tersebut. Berikut penulis uraikan secara lebih jauh politisasi-politisasi yang terjadi di tahapan tersebut, di bawah ini:

Tahap pendaftaran hingga penetapan pengumuman pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berlangsung selama 47 hari mulai dari 04 Agustus- 20 September 2018 (Peraturan KPU No 07, 2017). Pada tahap pendaftaran kedua Paslon 01 dan 02 sama-sama mempolitisasi instrument agama seperti identitas ke-muslim-an yang digunakan dalam menentukan Cawapres. Selain identitas ke-muslim-an, pada tahap ini Ormas seperti Nahdhatul Ulama beserta Kyai-kyai juga dijadikan sebagai media pelegitimasi untuk mengusung Cawapres (Sumandoyo, 2018).



Gambar 1. Potret Penggunaan Identitas Keagamaan

Posisi Cawapres untuk Joko Widodo masih menjadi perhatian. Identitas “Muslim” menjadi instrumen penting yang dimainkan pihak Jokowi dalam menetapkan pasangannya. Golkar sebagai Parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi, memberikan gambaran kriteria yang pantas untuk menjadi pasangan Jokowi. Ketua Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar Nusran Wahid mengatakan ada beberapa kriteria untuk Cawapres Jokowi. Identitas “Muslim” menjadi kriteria pertama yang diusulkan, sebab dengan menggunakan identitas “Muslim” dapat mengantisipasi untuk tidak terjadi lagi aksi-aksi seperti aksi Al-Maidah (Penistaan Agama) di tahun 2017 silam. Kriteria kedua, Cawapres yang akan mendampingi Jokowi harus “Muslim berkarismatik” yang dapat mempertemukan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al Irsyad.

Cawapres Jokowi harus Muslim yang baik, biar tidak terjadi Al-Maidah kedua” merujuk pada kasus yang menimpa Basuki Thaja Purnama atau Ahok yang telah dipenjarakan oleh kelompok Islam tertentu dengan tuduhan penistaan terhadap agama 2017 silam. Kemudian kata Nusran kriteria selanjutnya, sosok Cawapres harus menjadi representasi umat. "Dia punya daya stroom, daya magnitude yang kuat. Bisa rangkul NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad juga. Juga lapisan kultural" (Indonesia Lawyers Club 2018, 27 Februari 2018).

Identitas “Muslim” tersebut juga dilekatkan pada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Mahfud MD. Bagi Airlangga, Mahfud MD adalah “Tokoh Muslim” yang mengungguli sejumlah nama dalam bursa Calon Wakil Presiden. Selain itu Pendukung Jokowi harus mempertimbangkan Cawapres dari tokoh Islam dan membahas isu Islam berkeadaban, seperti Mahfud MD yang paling tinggi di kalangan tokoh Islam” ungkap Airlangga. Lebih lanjut Airlangga menjelaskan bahwa Mahfud MD adalah tokoh Islam dari kalangan NU dinilai mewakili klaster tokoh ormas keagamaan, profesional dan tokoh dengan latar belakang Islam, yang dapat memberikan dampak suara kepada calon petahana Jokowi” (Era.id 2018). Narasi yang mengatakan bahwa Mahfud adalah tokoh Muslim dan sekaligus Kader NU, ternyata memberikan polemik di internal NU sendiri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menyatakan Mahfud MD bukan kader Nahdlatul Ulama. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU, seperti PMII atau IPNU di Kantor PBNU, Rabu (8/8) (Cnnindonesia.com, 2018). Pernyataan ini muncul dalam konteks untuk menegaskan kepopuleran Mahfud sebagai tokoh Islam yang dikabarkan menjadi kandidat paling berpotensi mendampingi Jokowi pada pilpres 2019 dari kalangan tokoh NU. Ucapan “*Pak Mahfud orang yang belum menjadi kader NU*” ini diharapkan bisa mengurangi peluang Mahfud menjadi Cawapres serta dukungan umat Islam terkhusus kader-kader Nahdiyin yang merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang tentunya dukungan dari ormas ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil pilpres nantinya.

Pada video yang dimuat akun YouTube Antara TV Indonesia pada 24 Juni 2018 ini yang diberi judul “*Ketum PBNU dukung TGB jadi Cawapres Jokowi*” disebutkan bahwa Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj mendukung Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang alias TGB menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019. Karena TGB dinilai merupakan sosok tokoh Islam yang cakap, punya kapasitas dan kapabilitas. “*TGB adalah tokoh Islam yang cakap, cakap, punya kapasitas, punya kapabilitas, dan punya visi keadilan, dan berani*” Hal tersebut diungkapkan Said Aqil usai meresmikan Madrasah Kader Nahdatul Ulama dan Laboratorium Gizi Universitas Nahdatul Ulama NTB di Mataram (Antara TV Indonesia, 2018).



Gambar 2. Potret Penggunaan Organisasi Keagamaan dalam Pemilihan Cawapres

Sebanyak 95 kiai Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Siraj sepakat mendorong Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai Calon Wakil Presiden Jokowi pada 2019 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara para Kiai, Kiai Anwar Iskandar, setelah puluhan kiai pemilik pesantren besar di sejumlah daerah itu, mendatangi Kiai Said di Kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu (4/8/2018) malam. "Para kiai dan PBNU menyepakati 'kalimatun wahidah wa shaffin wahidah' (satu bahasa dan satu barisan) mendukung dan mengawal Cak Imin menjadi cawapres" kata Kiai Anwar. Alasan pemberian dukungan tersebut, lanjut Kiai Anwar, lantaran para kiai memandang Pilpres kali ini merupakan kesempatan emas untuk membangun dan membesarkan NU (Tribunnews.com, 2018a).



Gambar 3. Potret Penggunaan Identitas Muslim dan Ulama Pada Kubu Jokowi

Bentuk politisasi terhadap ulama berikutnya ini datang dari Mubalig se-Jawa Barat. "karena kami menilai mereka berdua adalah capres dan cawapres pilihan umat Islam saat ini" kata Sekjen Ikhwanul Mubalig KH Anwar Fadholi, Selasa (31/7). Kalimat "pilihan umat Islam saat ini" yang disampaikan Sekjen Ikhwanul Mubalig KH Anwar Fadholi ini ingin menjelaskan bahwa Jokowi dan Airlangga Hartanto adalah pilihan umat Islam, yang diwakili oleh ratusan Mubalig se-Jawa Barat. Hal ini diharapkan agar umat Islam yang awam juga mendukung Airlangga Hartanto sebagai cawapres Jokowi karena Airlangga adalah pilihan dari para Mubalig yang merupakan tokoh yang dalam agama Islam berperan menyampaikan pesan-pesan agama, maka dukungan Mubalig terhadap Airlangga adalah juga pesan agama. "Airlangga Hartanto adalah orang yang pantas mendampingi Pak Jokowi dalam Pilpres 2019". Karena di mata para kiai, Airlangga memang seorang yang mengerti ekonomi bangsa dan dekat dengan para ulama serta para kiai, makanya para kiai dan ulama menandatangani surat dukungan supaya Pak Jokowi berpasangan dengan Airlangga Hartanto (Merdeka.com 2018).

Di dalam Channel YouTube Detik.com pada 09 agustus 2018 itu Jokowi mengatakan alasannya memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya untuk berlaga pada pilpres 2019. Jokowi mengatakan.

Mengapa Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin yang di pilih? Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin lahir di Tangerang 11 Maret 1943 adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana, beliau pernah duduk di legislative sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais'Aam PBNU, dan juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kaitanya dengan kebhinekaan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin

saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami saling melengkapi, Nasionalis-Religius" dalam jumpa pers di Restoran Plataran, Jakarta Kamis, 9/8/2018 (Detik.com, 2018a).

Pemilihan Jokowi terhadap Ma'ruf Amin sebagai Cawapres mendapatkan apresiasi dari para santri milenial Banten. Masyarakat Banten, sangat memimpikan pemimpin yang memiliki latar belakang ulama. Karena itulah saat ulama asal Banten ditunjuk menjadi calon orang nomor dua di negara ini, banyak santri yang menyambut gembira. Salah satunya adalah Akhyar, santri dari sebuah pesantren modern di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Santri yang sekaligus pemilih pemula ini menyampaikan ia dan kawan santrinya menyambut gembira dengan dipilihnya Kiai Ma'ruf sebagai Cawapres. Baginya jelas sudah pilihan bagi para santri se-Indonesia akan memilih ulama. "Tidak ada yang meragukan keulamaan Kiai Ma'ruf Amin. Saya yakin para santri yang punya hak pilih pastinya akan memilih beliau. Masa iya ada santri tidak mendukung ulama memimpin negara ini" ujarnya se usai menggelar pertemuan para santri dalam rangka peringatan Hari Santri, di Banten (Ainurrahman2018).

Untuk Kubu 02 (Prabowo-Sandi) pada tahap pendaftaran ini tidak jauh berbeda dengan Kubu 01. Prabowo menggunakan instrument seperti ulama dalam bentuk berbagai keputusan baik Ijtihad maupun Ijtimak. Berbagai Ormas seperti FPI; FUI; dan GNPF juga dijadikan sebagai instrumen penting dalam memutuskan siapa yang manjadi Cawapres. Dalam bentuk rekomendasi sejumlah nama tokoh agama yang di usulkan untuk menjadi Capres dan Cawapres dukungan dari para ulama.



Gambar 4. Potret Penggunaan Ulama Pada Kubu Prabowo

Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional yang berlangsung 27-29 Juli merekomendasikan Ketua Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden. Penanggung jawab acara, Yusuf Muhammad Martak, menyebut dua skenario pasangan Prabowo. Opsi pertama, dia didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri; sementara pilihan kedua, ia disandingkan dengan ulama Abdul Somad. "Kedua pasangan mewakili dari nasionalis dan religius. Kedua pasangan ini bisa kita perjuangkan dan pertanggungjawabkan," kata Yusuf di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Minggu (29/7) (Tempo, 2018).

Yusuf yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) mengatakan dua rekomendasi ini merupakan hasil diskusi langsung dengan Rizieq Shihab. "Tanpa tatap muka tapi melakukan telekomunikasi telepon. Beliau (Rizieq) mengarahkan dengan segala pertimbangan dari segala sisi yang akan memenuhi unsur-unsur kriteria dalam pemilihan Capres dan Cawapres," ujar Yusuf. Ijtimak menyerahkan pengambilan keputusan berdasarkan dinamika Pilpres 2019 kepada Prabowo. Walau demikian, Yusuf meyakini Prabowo bakal menerima rekomendasi tersebut. "Insya Allah apa yang direkomendasikan ijtimak akan dipertimbangkan dan diterima dengan senang hati. Inilah aspirasi dari para ulama tidak hanya menyampaikan calon tapi juga menyampaikan akan membantu saat Pilpres nanti" ujar Yusuf. Ijtimak Ulama yang digelar GNPF mengundang lima partai politik, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya. Namun demikian, rekomendasi ini tidak berarti harus disepakati partai koalisi. Tokoh-tokoh yang sedianya dipertimbangkan antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (Tempo, 2018).

Dalam pernyataannya, KH Arifin Ilham meminta Ustaz Abdul Somad tampil menyelamatkan negara. Menurutnya, inilah saatnya negara dipimpin 'hamba Allah yang saleh'. Berikut ini pernyataan selengkapnya dari KH Arifin Ilham:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abangku yang kucintai karena Allah, yang sangat-sangat Arifin sayangi karena Allah Jalla Jallaaluh. Dari lubuk hati Arifin yang paling dalam, selesai shalat malam, masih di atas sajadah. Arifin mohon ampun pada Allah. Abangku, dunia ini sebentar. Dan dakwah yang paling jitu, paling tepat, paling mulia, dan mengundang kesuksesan, keberkahan adalah dakwah bil quwwah, bukan hanya dakwah bil lisan. Saatnya, Bang, mencontoh perjalanan Rasulullah dan para sahabat; menjadi umara dan ulama sekaligus. Ini karunia Allah untuk negeri kita, Allah hadirkan Abang. Hargai Bang; istikharah dan musyawarah, ijtima para ulama memutuskan Abang untuk memimpin negeri ini, mengawal, mendampingi Ayahanda Prabowo. Negeri ini merindukan pemimpin yang shalih, yang alim, yang bertaqwa, yang rendah hati. Bukan hanya umat, Bang, tetapi alam negeri ini. Semua mengalami krisis yang luar biasa; iman, ilmu, amal. Tampillah, Bang, untuk menyelamatkan negeri ini. Senangkanlah hati umat. Penuhilah harapan ulama. Abangku yang kucintai karena Allah, Arifin yakin; istikharah-firasat Arifin bahkan sebelum Ijtima Ulama, Arifin sudah sampaikan kepada ulama-ulama agar Abang menjadi pemimpin negeri ini. Tulus. Arifin melihat dengan hati Arifin. Arifin mencintai Abang karena Allah. Arifin sepenuh hati mendukung Abang. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Saatnya negeri ini dipimpin oleh hamba-hamba Allah yang shalih. Maafkan Arifin, ya Bang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (Tvonenews, 2018).



Gambar 5. Potret Penggunaan Keputusan Ulama

"Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan Prabowo Subianto-Al Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad Batubara sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019" kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Muhammad Martak membacakan rekomendasi di Hotel Peninsula, Jakarta, Minggu (29/7). Menurut Yusuf, kedua nama Cawapres itu dapat mengakomodir kepentingan umat. Keduanya dinilai sosok yang tepat. "Keterwakilan umat Islam tidak pernah diakomodir, maka dari itu Ijtima mengusulkan kedua-duanya punya ketokohan sebagai ulama" ucapnya (Merdeka.com 2018).

Hasil rekomendasi dari Ijtima ulama GNPF yakni Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad (UAS), adalah dua nama yang punya basis massa dan dukungan kuat di akar rumput. Salim Segaf Al-Jufri adalah Ketua Majelis Syura PKS, mantan Menteri Sosial era SBY dan juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Oman. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan keturunan Ulama besar Palu, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan nama "Guru Tua" pendiri yayasan Al-Khairaat. Beliau juga masih punya garis hubungan sangat dekat dengan Habaib dan juga dekat dengan kiyai NU, dan tokoh Muhammadiyah, cenderung lebih moderat dan mampu berkomunikasi dengan semua kelompok dan kekuatan Islam mana pun. Oleh karena itu, penerimaan (*akseptabel*) terhadap sosok ini cukup luas sehingga upaya menyatukan kekuatan Islam yang menjadi agenda politik dikalangan umat Islam akan menemukan momentum yang tepat dan kian nyata. Di sisi lain, Salim Segaf Al-Jufri juga sudah berpengalaman dalam urusan pemerintahan (punya jam terbang) dengan posisi strategis sebagai Menteri Sosial dan Duta Besar. Tentu saja

menjadi modal yang sangat berharga untuk menjadi Wakil Presiden jika nanti beliau berjedodh dipasangkan dengan sosok Prabowo Subianto (Alam, 2018).



Gambar 6. Potret Penggunaan Organisasi Keagamaan

Mantan Danjen Kopassus itu mengaku berhubungan baik sejak lama dengan NU. Prabowo mengklaim sangat dekat dengan Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. "Saya afirmasi kembali lah, bahwa saya akan selalu konsultasi dengan NU atas setiap langkah yang kita ambil" tegasnya. Prabowo menambahkan, NU punya peran besar sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia. Anggota NU tersebar di seluruh Indonesia. "Yang warganya sangat besar, jadi hanya logika yang mendorong saya bahwa setiap kebijakan setiap keputusan penting, sebaiknya, konsultasi dengan NU," (Medcom.id, 2018). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj mengatakan PBNU tengah menyiapkan Kartu Anggota untuk bakal Calon Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Said Aqil se usai menerima kunjungan Prabowo di kantor PBNU pada sore hari ini. "Insya Allah lagi disiapkan kartu anggota NU untuk Pak Prabowo" kata Said Aqil di kantor PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018. Said kemudian memuji Prabowo sebagai sahabat mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kata Said Aqil, Gus Dur pernah memuji Prabowo sebagai orang yang ikhlas berbuat untuk bangsa. "Gus Dur pernah mengatakan kalau cari orang ikhlas pada bangsa itu Prabowo. Masih ingat saya omongan itu," (Tempo.co, 2018). "Kehormatan bagi saya, sudah berapa saat sebetulnya saya mengajukan, karena merasa dekat dengan NU," kata Prabowo di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018). Prabowo juga mengungkapkan kedatangannya tadi juga disambut hangat pengurus NU. Dia menilai NU sebagai lembaga penjaga moral di Indonesia. "Saya kira sikap NU sangat *wise* dan bijaksana, NU tidak akan berpolitik praktis, NU adalah organisasi yang mewakili Nahdliyin tapi juga moral, penjaga moral. Semua saya kira kedua pasang akan selalu diingatkan oleh NU ya, dan memang kenyataannya tadi ya, semua pihak NU hadir," (Detik.com, 2018b).



Gambar 7. Potret Hasil Keputusan Organisasi Keagamaan dan Ulama

Alasan pertama karena Prabowo dianggap lebih mengutamakan Islam dibandingkan dengan lawan politiknya, Joko Widodo. Sikap tersebut merupakan poin utama dari Ijtimak Ulama. "Saya mengharapkan bapak Prabowo bersyukur kepada para ulama dan ummatinya dan berkomitmen bahwa kerakyatan dan kenasionalan Indonesia yang lebih mengutamakan

Islam. Karena kita mementingkan Islam dan seterusnya itu adalah poin dari Ijtimak Ulama," ungkap Gus Najih. Alasan kedua karena Prabowo dianggap lebih memperhatikan kesejahteraan para santri. Mensejahterakan para santri merupakan anugerah dari Allah yang harus terus diperjuangkan. "Mensejahterakan para santri dan seterusnya, ini merupakan anugerah dari Allah memperjuangkan keimanan" ungkap Gus Najih.

Alasan terakhir adalah nasionalisme Prabowo. Walau menjunjung tinggi Pancasila, Prabowo memiliki jiwa Islam. Islam yang dipercayanya dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini harus disyukuri, harus diperjuangkan, pun kita tetap Pancasila, tapi tetap jiwanya Islam. Itulah Islam yang menjadikan negara ini menjadi makmur. Kita setelah merdeka belum pernah menjadi makmur yang mandiri, yang benar-benar kita terjajah dulu oleh Amerika sekarang juga mungkin dijajah oleh China, kapan kita ini (merdeka) kalau tidak berjiwakan Islam. Dan yang melawan penjajah itu mulai dari Kerajaan Islam yang melawan penjajah. Nggak ada itu non Islam yang memperjuangkan, soalnya semuanya nurut kepada Islam" (Wartakotalive.com 2018).

Berikut ini adalah tujuh poin isu agama dalam Kontrak Politik dan Fakta Integritas yang diteken Prabowo Subianto saat Ijtimak Ulama II berlangsung yang dikutip dari (Tirto.id, 2018).

- a. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.
- b. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam maupun umat agama-agama lain yang diakui pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.
- c. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Umat Islam) secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
- d. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.
- e. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan, serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulungan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah/sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman.
- g. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Calon Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ma'ruf Amin menyindir kubu Prabowo Subianto yang tidak mempedulikan rekomendasi Ijtimak Ulama dalam menunjuk Calon Wakil Presiden. Padahal, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, kubu tersebut mengaku-ngaku menghargai ulama. "Ada belah sono bilang menghargai ulama, menghargai ulama tapi usul Ijtimak Ulama tidak didengerin. Malah wakilnya bukan ulama" kata Ma'ruf saat kunjungan ke kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8) (Sumber). Sebelumnya, Gerindra, PKS, PAN dan belakangan Demokrat, mengusung pasangan calon Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. Nama Sandi baru muncul di menit-menit akhir. Padahal sebelumnya Prabowo direkomendasikan lewat *ijtimak Ulama* agar menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad (Merdeka.com, 2018a). Olok-olok politik ini muncul dalam konteks untuk menunjukan bahwa Prabowo tidak menghargai ulama.

Forum Umat Islam (FUI) menyatakan, meskipun rekomendasi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari *ijtimak GNPf-Ulama* tak dipilih Prabowo, formasi Prabowo-Sandiaga tetap merepresentasikan keinginan Ulama. Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khatthath mengatakan, Prabowo adalah satu-satunya Calon Presiden (Capres) yang direkomendasikan GNPf Ulama. "Cawapres memang bukan rekomendasi, tapi Prabowo merupakan rekomendasi

Ijtimak Ulama. Kami memaklumi ini" kata Al-Khaththath di Gedung KPU, Jumat (10/8) (Andri Saubani, 2018). Diketahui bersama, Cawapres yang direkomendasikan oleh GNPF adalah Ustadz Abdul Somad dan Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Namun, Al-Khaththath mengatakan, walaupun Ustadz Somad punya elektabilitas tinggi tapi menolak dijadikan Cawapres. Sedangkan, Salim Segaf tidak dipilih oleh koalisi. Ia mengungkapkan, jelang putusan koalisi Prabowo, GNPF sempat mengusulkan Ustadz Arifin Ilham sebagai Cawapres. Namun, waktu tidak memungkinkan bagi koalisi untuk membahas usulan tersebut. Alhasil, Sandiaga Uno menjadi pilihan terakhir Prabowo untuk ditunjuk sebagai Cawapres. "Imam Besar Habib Rizieq juga sudah mengamanatkan untuk mendukung tiga partai, PKS, PAN, dan Gerindra. Jadi ini sudah sesuai rekomendasi. Skemanya persis seperti Pilgub DKI," kata dia. Sandiaga, lanjutnya, sudah cukup mewakili suara ulama. Sebab, saat Pilgub DKI 2017, para ulama mendukung pasangan Anies-Sandi. Ia berharap kemenangan Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat terulang di ajang Pilpres 2019 mendatang (Andri Saubani, 2018).



Gambar 8. Potret Kuatnya Keputusan Ulama

4.2. Ijtima' Ulama dan Cara Elite Mempolitisasi Agama

Sejarah politisasi agama di Indonesia sudah menjadi fenomena dan fakta yang tidak asing lagi. Jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, politisasi agama, khususnya politisasi Islam, sudah menjadi pemandangan lumrah di kalangan masyarakat Indonesia. Studi ini memiliki temuan bahwa Capres dan Cawapres 2019 yang berkontestasi adalah hasil dari tarik-menariknya simbol-simbol agama yang digunakan pada tahap awal Pilpres 2019. Pada tahap ini identitas Muslim menjadi tawaran yang ditransaksikan dalam penetapan pasangan Capres dan Cawapres 2019. Identitas ini muncul bukan hanya karena Indonesia bermayoritaskan Islam, namun lebih dari itu, identitas ke-muslim-an yang muncul dan ditransaksikan merupakan implikasi dari situasi sosial politik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sejumlah rangkaian peristiwa yang mengatasnamakan "agama" dapat menjadi bukti bahwa politik identitas sedang dan telah terjadi dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Sejumlah aksi-aksi Bela Islam mulai dari Aksi Bela Islam I (Aksi 1410), Aksi Bela Islam II (Aksi 411), Aksi Bela Islam III (Aksi 212 Jilid 1), Aksi Bela Islam IV (Aksi 212), Aksi Bela Islam V (Aksi 212 Jilid II) dan Aksi Bela Islam VI (Aksi 313) menjadi ruang representasi atas menguatnya politik identitas yang membawa simbol-simbol keagamaan (Islam). Aksi-aksi ini ditengarai oleh kelompok dan Ormas-Ormas Islam mulai dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI dan Forum Umat Islam (FUI).

Begitu pula dengan ulama dan sejumlah Ormas keagamaan. Serangkaian seremonial keagamaan seperti ijtihad dan ijtima juga dijadikan sebagai media pelegitimasi untuk memunculkan kontestan Pilpres 2019. Menariknya hasil ijtihad dan ijtima tidak bersifat statis dan baku, namun ia bersifat dinamis yang dapat berubah menyesuaikan dengan situasi politik yang terjadi. Fakta yang demikian, kontras terjadi pada pra pendaftaran Capres dan Cawapres 2019 baik untuk Jokowi maupun Prabowo dalam menetapkan pasangannya. Jika studi Sanur(2018) menjelaskan bahwa penyandingan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah hasil dari kesepakatan dan konsolidasi yang baik antar partai politik, maka studi ini melihat dari *landscape* yang berbeda, bahwa adanya Capres dan Cawapres dalam kontestasi politik 2019 juga tidak bisa dilepaskan dari tarik-ulur identitas yang bermain baik identitas ke-muslim-an maupun identitas ke-ulama-

an. Ia telah menjadi unsur senjata untuk melumpuhkan lawan sekaligus melakukan adaptasi dengan khalayak.

Pembicaraan tentang Ijtimak ulama sempat menghangat setelah pertemuan para politikus dan ulama pada 27 Juli 2018 silam, pertemuan ini di sebut sebagai Ijtimak ulama, yang kemudian menghasilkan keputusan berupa rekomendasi nama Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019. Nama Prabowo muncul sebagai Capres dan dua nama lagi sebagai Cawapres yaitu, Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad Batubara. Ijtimak ini di inisiasikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dengan mengundang lima Partai politik yaitu, Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya. Dalam Islam, Ijtimak Ulama biasanya dikaitkan dengan keputusan dalam ranah fiqh (Hukum Islam), Ijmak yang berarti kesepakatan atau konsensus. Ijtimak adalah hasil konsensus tersebut. pada cabang ilmu fiqh, ijmak menempati urutan ketiga dari empat sumber hukum yang sah setelah Alquran dan Hadis. Dengan kata lain, ijtimak bukan sesuatu yang main-main. Kesan yang muncul dari ijtimak adalah legitimasi religius yang kuat. Ini terjadi lantaran para pelaku ijmak biasanya adalah para ulama yang mumpuni di bidangnya.

Pada konstelasi Pilpres 2019, istilah ijtimak ini terus di gaungkan oleh kubu penantang, Prabowo-Sandiaga. Penggagas ijtimak ulama ini ialah GNPF-U, organisasi ini pada awalnya ialah perkumpulan sekelompok tokoh yang ingin mengawasi Fatwa MUI (GNPF-MUI) terkait kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Thaja Purnama (Ahok) pada Pilkada 2017, yang kemudian merubah nama menjadi GNPF-U agar dapat memperjuangkan aspirasi Umat Islam secara lebih luas. Dan akhirnya isu-isu politik pun tidak lepas dari sorotan kelompok ini. Atas dasar inilah kemudian GNPF-U melakukan ijtimak untuk menghasilkan keputusan siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam di Indonesia. Pada 27 Juli 2018, ijtimak pertama digelar kelompok ini dan menghasilkan keputusan berupa nama Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019, nama Ketua Umum Partai Gerindra muncul sebagai Capres dan dua nama lagi sebagai Cawapres yaitu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ulama kondang Ustadz Abdul Somad Batubara. Pada perjalanannya, dua nama Cawapres di atas tidak ada yang menjadi Cawapres, Salim Segaf Al-Jufri tidak diterima oleh partai koalisi untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 dan untuk Ustadz Abdul Somad Batubara, beliau sendiri yang menolak untuk menjadi Cawapres Prabowo.

Tidak hanya sampai di sini, setelah ditolaknya dua nama Cawapres hasil ijtimak, GNPF-U masih ingin melakukan ijtimak dan merekomendasikan nama-nama ulama alternatif seperti Ustadz Arifin Ilham dan Aa Gym. Namun lagi-lagi hal ini tidak terwujud, dan Ketua Umum GNPF-U, Yusuf M. Martak mengatakan akan terus mendesak pihak Prabowo agar menggandeng Cawapres nya dari kalangan ulama. Beliau juga mengatakan bahwa kubu Jokowi telah memilih Cawapresnya dari kalangan ulama untuk meraup simpati umat Muslim. Pihak Jokowi pun menanggapi hal ini dengan olok-olok yang dikemukakan oleh Cawapres nya yaitu KH.Ma'ruf Amin, dalam pernyataannya di media online merdeka.com mengatakan "*ada bela sono bilang menghargai ulama, tapi ijtimak ulama tidak di terima*" (Merdeka.com, 2018a). Selanjutnya pihak GNPF-U melakukan ijtimak yang ke III dengan hasil, tetap mendukung Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, karena Sandiaga walaupun bukan dari kalangan ulama tapi beliau merupakan mantan Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anis Baswedan yang tahun 2017 lalu juga di dukung oleh kelompok ini dan juga merupakan hasil ijtimak ulama juga. Dari uraian di atas tampak bahwa Identitas "Ulama" masih menjadi pertimbangan penting dalam konstelasi perebutan kekuasaan di Indonesia.

5. Kesimpulan

Studi ini telah menunjukkan bahwa munculnya Capres dan Cawapres sebagai kontestan dalam pada pemilu presiden Indonesia 2019 adalah hasil dari kontestasi dan tarik ulur simbol keagamaan, yakni identitas ke-muslim-an dan identitas ke-ulama-an. Hal ini ternyata telah berhasil menimbulkan politik kebencian pada konstelasi Pilpres 2019, ini dapat dibuktikan dari munculnya olok-olok politik yang dilakukan masing-masing kubu. Kubu Jokowi mengatakan pihak Prabowo tidak menghargai ulama karena menolak hasil ijtimak ulama. sedangkan kubu Prabowo mengatakan bahwa pihak Jokowi telah memanfaatkan ulama untuk meraup suara umat muslim dengan menjadikan KH.Ma'ruf Amin sebagai Cawapres nya. Tentu temuan ini bukanlah faktor dominan yang muncul dalam penetapan kedua pasangan Capres dan Cawapres, hanya saja merupakan pembuktian bahwa fenomena politisasi agama telah terjadi pada awal penetapan Capres

dan Cawapres pada kontestasi Pilpres 2019, dan telah menyebabkan munculnya politik kebencian atas nama agama.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian, penulisan dan publikasi artikel ini.

7. Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan antar penulis dan subjek penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, N. (2018). Politisasi Agama Di Era Digital Dan Penanganannya. *Prosiding Seminar Nasional Politik Dan Ilmu Hubungan Intenasional*, 141–145.
- Akurat.co. (2018). *Santri Milenial Gembira Jokowi Pilih Ulama Asal Banten Jadi Wakilnya*. <https://akurat.co/santri-milenial-gembira-jokowi-pilih-ulama-asal-banten-jadi-wakilnya>
- Al-Qurtuby, S. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *MAARIF*, 13(2), 43–54.
- Alam, M. (2018). *Jangan Abaikan Rekomendasi Ijtima Ulama Soal Capres-Cawapres*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/miftahul84311/5b6831b2bde5757c0b57b1e8/jangan-abaikan-rekomendasi-ijtima-ulama-soal-capres-cawapres?page=all>
- Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *Jurnal Aristo*, 2(2), 25–52. <https://doi.org/10.24269/ars.v2i2.16>.
- Antara TV Indonesia. (2018). *Ketum PBNU dukung TGB jadi cawapres Jokowi*.
- Ayani, B. (2015). Islam Politik Dalam Media Massa: Sebuah Telaah Kritis Atas Pemberitaan Ideologi Politik Dalam Kasus-Kasus Keagamaan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(1), 39–66.
- Cnnindonesia.com. (2018). *Said Aqil: Mahfud MD Bukan Kader NU*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808192555-32-320668/said-aqil-mahfud-md-bukan-kader-nu>
- Detik.com. (2018a). *Alasan Jokowi Gandeng Ma'ruf Amin: Nasionalis-Religius*. Detiknews. <https://20.detik.com/detikflash/20180809-180809107/alasan-jokowi-gandeng-maruf-amin-nasionalis-religius>
- Detik.com. (2018b). *Dapat Kartu Anggota NU, Prabowo: Kehormatan bagi Saya* -. <https://news.detik.com/berita/d-4169893/dapat-kartu-anggota-nu-prabowo-kehormatan-bagi-saya>
- era.id. (2018). *Mahfud MD, Tokoh Islam Paling Layak Jadi Cawapres*. <https://era.id/afair/10307/mahfud-md-tokoh-islam-paling-layak-jadi-cawapres>
- Faridah, S., & Mathias, J. (2018). Politicization of Religion: Breaking the National Unity in Elections. *Law Research Review Quarterly*, 4(3), 489–506. <https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27023>
- Fernandes, A. (2019). *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas* (No. 1; CSIS Election Series, Issue 1).
- Firdaus, F. (2013). Parade Iklan Politik di Tahun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Politik Untuk Membangun Citra Menuju Pemilu 2014. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 1(1), 81–94.
- Hafidz, M., Susanto, N. N., Zaid, M., Ihsan, M., & Aritonang, D. (2017). *Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*.
- Hasfi, N. (2017). Politik Keshalehan Personal dalam Pemilihan Presiden 2014 dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 48–64. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28580>
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Indonesia Lawyers Club. (2018). *Nusron: Wakil Jokowi Harus Muslim, Kalau Tidak akan Muncul "Al-Maidah 2*. Indonesia Lawyers Club.
- Ispandriano, L. S. (2013). Agama dan Media: Pemaknaan Isu Agama di 'detiknews.' *Millah*:

- Jurnal Studi Agama*, XII(2), 595–616. <https://doi.org/10.20885/millah.volxii.iss2.art13>
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>
- Malik, A., & Batubara, A. (2014). Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi. *Kontekstualita*, 29(2), 99–114.
- Masduki. (2004). Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.22146/jsp.11059>
- Masykuri, M. F. S. R. dan R. (2019). *Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018*. 15(726).
- Mawardhi, G. (2012). *Pembingkai berita media online (analisis framing berita mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*. Universitas Indonesia.
- Medcom.id. (2018). *Prabowo Konsultasi Cawapres ke PBNU*. <https://www.medcom.id/nasional/politik/DkqLBWeb-prabowo-konsultasi-cawapres-ke-pbnu>
- Merdeka.com. (2018a). *KH Ma'ruf Amin: Ada belah sono bilang menghargai ulama, tapi Ijtima gak didengerin*. <https://www.merdeka.com/politik/kh-maruf-amin-ada-belah-sono-bilang-menghargai-ulama-tapi-ijtima-gak-didengerin.html>
- Merdeka.com. (2018b). *Ratusan Mubalig di Jawa Barat dukung Airlangga jadi cawapres Jokowi*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/politik/ratusan-mubalig-di-jawa-barat-dukung-airlangga-jadi-cawapres-jokowi.html>
- Merdeka.com. (2018c). *Rekomendasi Ijtima Ulama: Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad jadi cawapres Prabowo*. Merdeka.Com.
- Muthoin. (2015). Komodifikasi Politik Khutbah Jum'at. *Jurnal Penelitian*, 12(2), 282–294. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i2.654>
- Muttaqin, A. (2012). Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa. *Komunika Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(2). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i2.349>
- Muzakki, A. (2014). Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam Pilpres 2009. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.61-76>
- Nawawi, M., & Anriani, H. B. (2011). *Dynamics of Ethnicity and Political Conflict in Pemilukada*. April.
- Nurahman, A. (2017). *Agenda Media Tentang Isu-Isu Agama Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Studi Analisis Isi Pemberitaan Tentang Pemilihan Kepala Daerah Di Kompas.Com Dan Liputan6.Com)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurani, H. (2018). Kuasa Media atas Agama dan Bentuk Intoleransi Agama terhadap Media. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v3i1.3460>
- Peraturan KPU No 07. (2017). *Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Ramadlan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249–265. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Republika.co.id. (2018). *FUI: Prabowo-Sandi Sudah Sesuai Rekomendasi Ulama*. Republika. <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/10/pd94t9409-fui-prabowosandiaga-sudah-sesuai-rekomendasi-ulama>
- Ruslan, I. (2014). Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik. *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(2), 161–172. <https://doi.org/10.29300/madania.v18i2.15>
- Sanur, D. (2018). Konsolidasi dan Strategi Pemenangan Pemilihan Presiden 2019. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10(16), 25–30.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145–156.
- Sumandoyo, A. (2018). *Pilpres 2019 : Ulama Sana Versus Ulama Sini*. Tirto.Id. <https://tirto.id/pilpres-2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4>
- Sumardiana, B. (2016). Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 80–95. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5254>

- Syahputra, I. (2016). Agama di Era Media: Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 1(17), 125–138.
- Tempo.co. (2018). *Said Aqil: PBNU Siapkan Kartu Anggota untuk Prabowo Subianto*. <https://pilpres.tempo.co/read/1117842/said-aqil-pbnu-siapkan-kartu-anggota-untuk-prabowo-subianto>
- Tempo. (2018). *Ijtima Ulama GNPF Rekomendasikan Abdul Somad Cawapres Prabowo*. <https://nasional.tempo.co/read/1111556/ijtima-ulama-gnpf-rekomendasikan-abdul-somad-cawapres-prabowo>
- Tirto.id. (2018). *Daftar 17 Kontrak Politik yang Diteken Prabowo Saat Ijtima Ulama II*. Tirto.Id.
- Tribunnews.com. (2018a). *Para Kiai NU se-Indonesia Dukung Cak Imin Cawapres Jokowi*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/05/para-kiai-nu-se-indonesia-dukung-cak-imin-cawapres-jokowi>
- Tribunnews.com. (2018b). *Tiga Alasan Tokoh Nahdlatul Ulama Pilih Prabowo-Sandiaga Uno*. Wartakota.Tribunnews. <https://wartakota.tribunnews.com/2018/09/17/tiga-alasan-tokoh-nahdlatul-ulama-pilih-prabowo-sandiaga-uno>
- Tvonenews. (2018). *Ustadz Arifin Ilham Bujuk Ustadz Abdul Somad Jadi Cawapres Prabowo*. Tvonenews.
- Zamzamy, A. (2016). Kapitalisasi Agama pada Tayangan Televisi (Tinjauan Teori Ekonomi Politik Media). *OECOMICUS: Journal of Economics*, 1(1), 49–70. <https://doi.org/10.15642/oje.2016.1.1.49-70>